



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 411 - Setda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara asia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2021);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 128 Tahun 2023).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/9/BAPPELITBANGDA tanggal 6 Mei 2024 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- 3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2024.
- KEENAM : Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output*.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 07 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
SUMBER – 45611

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini disamping untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggungjawab.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

 **Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini disamping untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggungjawab.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini disamping untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggungjawab.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024..... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 serta Capaian Renstra Sekretariat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah 30

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 36

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah 48

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja dan Pendanaan Sekretariat Daerah 49

BAB IV PENUTUP 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen Sekretaris Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan atas dasar:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Cirebon;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Pemecahan masalah yang dihadapi; dan
- e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Proses penyusunan Renja maupun Renja Perubahan perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perangkat daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai Renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berikut bagan alur penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Perubahan;

2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolak ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping mempunyai maksud sebagaimana tersebut di atas, penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 juga bertujuan untuk :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2024;

3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menguraikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 serta Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan dalam Renja disajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Cirebon selama satu tahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang sudah direncanakan antara lain :

- Belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur penunjang dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis di lingkup Sekretariat Daerah;
- Lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan kondisi demikian berimplikasi terhadap pencapaian target sasaran yang sudah direncanakan sekaligus mempengaruhi penilaian kinerja perangkat daerah dan personil yang melaksanakan kegiatan. Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan anggaran yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran RKPD:

- 1. Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah 3.40 Poin
- 2. Meningkatkan Koordinasi Bidang Pendidikan 84 Prosen
- 3. Meningkatkan Koordinasi Bidang Ekonomi 86 Prosen
- 4. Meningkatkan Koordinasi Bidang Kesehatan 84 Prosen
- 5. Meningkatkan Koordinasi Keagamaan 97 Prosen
- 6. Meningkatkan Implementasi Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah 68 Prosen
- 7. Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah 1 Jumlah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d akhir Ttn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra PD Ttn (Tahun n-1 yang direalisasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang direalisasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Ttn 2023 (Anggaran Renstra PD Ttn 2023 (%))			Unit Kerja Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K		Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
0.00.01.2.01	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PENGANTARAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308	100	2.14.11.8.846.308			
				100	2.14.11.8.846.308																							

No	Sasaran	Kode	Usasan/Bidang/Usutan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2024 (sasaran Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPJMD Kabupaten Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun berjalan (Tahun n-1 yang direvisi)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Kota s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pembahasan RPJMD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usutan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Pembiayaan RPJMD terhadap usutan kinerja Sus K4g dan Sus K4g dan Pembelian dan jasa penunjang usutan pemerintahan daerah (sasaran 1a)	4	9.427.480.000	1	0	933.437.122	0	2.191.024.110	0	3.386.747.510	1	3.132.657.343	1	5.132.657.343	1	14.812.777.881	28	137,20							
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Materai	4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Materai	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Surat Materai (sasaran 1a)	3500	895.000.000	0	3500	374.793.200	1147	146.229.824	2201	279.423.848	3382	392.877.472	3300	374.377.296	3300	374.377.296	100	87,37	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Siber dan Data dan lain-lain	4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Siber dan Data dan lain-lain	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Komunikasi, Siber dan Data dan lain-lain yang Diakses (sasaran 1a)	4	2.207.233.000	0	4	2.244.743.800	0	376.639.128	1	58.028.122	2	1.105.233.138	4	1.013.848.847	4	1.013.848.847	100	93,87	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa Pelayanan dan Pemasangan Kantor	4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa Pelayanan dan Pemasangan Kantor	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pelayanan dan Pemasangan Kantor yang Diakses (sasaran 1a)	8	1.969.537.000	0	11	248.651.400	3	37.842.100	6	110.384.400	9	184.385.200	12	248.691.400	12	248.691.400	100	100	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diakses (sasaran 1a)	3	4.000.000.000	0	2	2.880.000.000	0	332.728.000	0	1.004.510.000	1	1.617.369.200	2	2.393.740.000	2	2.393.740.000	40	59,39	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Pembiayaan RPJMD terhadap usutan kinerja Sus K4g dan Sus K4g dan Pembelian dan jasa penunjang usutan pemerintahan daerah (sasaran 1a)	4	9.427.480.000	1	6.385.333.310	0	833.484.020	0	2.243.288.376	0	3.343.337.753	1	3.960.992.484	1	3.960.992.484	1	3.960.992.484	25	139,07						
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	30	1.957.480.000	0	34	1.944.940.100	12	247.886.468	36	379.125.376	48	818.685.024	34	980.379.833	34	980.379.833	180	90,38	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	35	1.000.000.000	0	35	749.830.000	15	134.379.440	28	370.222.446	46	576.802.839	32	740.861.032	32	740.861.032	236	81,75	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.09.03	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.03	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	1030	750.000.000	310	90.132.000	335	82.000.000	0	0	0	0	0	335	81.942.000	330	81.942.000	1333	44,10	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.09.04	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.04	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	3	600.000.000	0	3	321.132.000	0	18.823.600	3	179.509.800	4	231.372.800	3	324.842.000	3	324.842.000	100	94,08	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.09.05	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.05	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	3	1.400.000.000	0	2	1.381.296.370	0	10.889.300	1	178.331.050	1	230.318.550	2	1.378.333.930	2	1.378.333.930	86,67	98,43	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.09.10	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.10	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	10	2.000.000.000	0	6	1.262.562.840	130	221.002.628	3	389.424.476	430	833.644.330	6	1.243.865.991	6	1.243.865.991	80	34,08	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.09.11	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	4.01.01.2.09.11	Penyediaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan	Usutan Laboran Pembiayaan jasa Pemeriksaan, Baku dan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan (sasaran 1a)	10	1.000.000.000	0	4	1.192.311.400	0	180.319.864	1	332.125.328	2	680.332.202	4	1.191.603.636	4	1.191.603.636	40	59,00	BAGIAN UMUM						
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	Berita Acara Pembiayaan RPJMD terhadap usutan kinerja Sus K4g dan Sus K4g dan Pembelian dan jasa penunjang usutan pemerintahan daerah (sasaran 1a)	2	2.749.778.000	0	1	2.024.218.960	0	408.280.301	0	351.129.424	0	1.833.188.320	1	2.014.320.111	1	2.014.320.111	0	72,73							

No	Sasaran	Kode	Unitas Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota pada Tahun 2024 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPMD Kabupaten Kota Tahun 2023 (Tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Kota s.d RPMD Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPMD Kabupaten Kota Tahun 2023 (Tahun n-1) yang direalisasi		I				II				III						IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-16	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		4.01.01.2.11.01	Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pengendalian Degradasi Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pengkaderan	2	1.133.188.000	2	1.133.188.000	2	443.524.424	2	633.822.329	2	980.481.111	2	980.481.111	100	74,32	58.038.744.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Kota Tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Kabupaten Kota Tm (n-2)		Target Kinerja dan RPJMD Kabupaten / Kota Tm Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Anggaran RPJMD Kabupaten Kota yang direalisasi		Realisasi Kinerja dan RPJMD Kabupaten Kota s.d Pelaksanaan RPJMD Tm 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RPJMD s.d Pelaksanaan RPJMD Tm 2023 (%)	Perangkat Daerah Pemanggang Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13				14-7-13		K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
					1	2	3	4	5																	
		4.01.03.2.01.03	Pemertanian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Perikanan (Mikro KSI) (tahun Dokumen)	1	835.000.000			0	1	135.921.900	3	19.110.026	4	35.153.648	6	88.400.270	7	122.535.222	7	122.535.222	100	14.64	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA		
		4.01.03.2.01.04	Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Mikro KSI) (tahun Dokumen)	1	400.000.000			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA		
		4.01.03.2.01.05	Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Mikro KSI) (tahun Dokumen)	1	430.000.000			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA		
		4.01.03.2.02.01	Administrasi Pembangunan	Berdasarkan Regulasi RPJMD kabupaten/kota/kelurahan yang ditetapkan pada kegiatan ini dan kegiatan pada kegiatan lain yang ada di lingkungan Kabupaten Bantul	4	1.324.232.287	1		0	1	475.206.400	0	81.151.580	2	139.262.848	0	30	248.141.412	1	473.343.234	1	1.110.139.912	25	13.36	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA	
		4.01.03.2.02.02	Manajemen dan Pengembangan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Program Pembangunan (tahun Dokumen)	2	730.000.000			0	2	135.205.600	0	18.641.360	1	30.011.792	1	33.704.024	2	135.789.826	2	139.789.826	2	139.789.826	100	18.11	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.02.03	Pengembangan Barung dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Barung dan Jasa (tahun Dokumen)	3	480.000.000			0	3	103.968.700	0	9.271.230	1	22.836.891	2	63.011.352	3	103.992.189	3	103.992.189	3	103.992.189	100	21.20	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.02.03	Pengembangan Barung dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Barung dan Jasa (tahun Dokumen)	4	284.232.287			0	4	236.232.100	0	58.231.940	1	136.712.173	2	135.423.936	4	239.891.339	4	239.891.339	4	239.891.339	100	32.28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.03.01	Pengembangan Barung dan Jasa	Berdasarkan Regulasi RPJMD kabupaten/kota/kelurahan yang ditetapkan pada kegiatan ini dan kegiatan pada kegiatan lain yang ada di lingkungan Kabupaten Bantul	4	2.233.261.179	1		0	1	1.127.138.600	0	148.935.170	0	428.800.790	0	709.091.482	1	1.129.346.103	1	1.129.346.103	1	1.129.346.103	25	123.66	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.03.01	Pengembangan Barung dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Barung dan Jasa (tahun Dokumen)	2000	610.733.200			0	1	331.442.400	0	49.631.708	0	145.480.093	0	257.170.484	1	332.230.173	1	332.230.173	1	332.230.173	0	34.24	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.03.02	Pengembangan Barung dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Barung dan Jasa (tahun Dokumen)	79	307.168.700			0	1	477.007.300	0	71.487.708	0	110.153.893	0	231.374.864	1	478.312.913	1	478.312.913	1	478.312.913	1	37.32	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.03.03	Pengembangan Barung dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Barung dan Jasa (tahun Dokumen)	1123	1.139.239.479			0	1042	318.726.900	200	47.921.718	200	133.166.700	240	210.546.024	1042	317.803.017	1042	317.803.017	1042	317.803.017	92.61	28	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.04.01	Pemertanian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Berdasarkan Regulasi RPJMD kabupaten/kota/kelurahan yang ditetapkan pada kegiatan ini dan kegiatan pada kegiatan lain yang ada di lingkungan Kabupaten Bantul	4	341.250.000	1		0	1	215.378.300	0	39.934.460	0	88.280.882	0	166.018.704	1	229.066.426	1	229.066.426	1	229.066.426	25	31.44	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA
		4.01.03.2.04.01	Pemertanian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Perikanan (Mikro KSI) (tahun Dokumen)	2	334.230.000			0	2	133.969.400	0	17.187.210	1	48.474.891	6	24.038.952	5	132.338.613	0	132.338.613	0	132.338.613	100	24.77	BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sedangkan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran RKPD:

- Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah 3,50 Poin
- Meningkatnya Koordinasi Bidang Pendidikan 86 Prosen
- Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi 89 Prosen
- Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesehatan 86 Prosen
- Meningkatnya Koordinasi Keagamaan 98 Prosen
- Meningkatnya Implementasi Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah 70 Prosen
- Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah 1 Jumlah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renstra Ttn Lalu (n-2)			Target Kinerja Renja PD Ttn Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s.d Ttn 2024 (akhir Ttn Pelaksanaan Renja PD Ttn 2024 (%))			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d Ttn 2024 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab			
				5			6			7			8			9			10			11			12				13		
				K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%		K	Rp	%
3.00	NON BIDANG URUSAN																										34-33%100%			35	
3.00.01	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Peningkatan Prosedur Administrasi Pemerintahan (Saluran Proses - Non Kumulatif Meningkat)	100	214.113.846.000	100	25.108.882.843	100	39.362.187.920	20.94	13.108.895.847	37.91	18.592.869.517	0	0	0	37.91	18.592.869.517	100	81.358.221.306	100	38	BAGIAN UMUM								
			Proses dan Sistem Administrasi Pemerintahan (Saluran Proses - Non Kumulatif Meningkat)	75	3.765.000.000	75	292.230.160	75	428.823.300	30	80.640.300	50	120.004.800	0	0	0	50	120.004.800	75	958.237.379	100	22.80	BAGIAN ORGANISAS								
			Proses dan Sistem Administrasi Pemerintahan (Saluran Proses - Non Kumulatif Meningkat)	100	3.486.381.100	100	392.531.833	100	330.908.800	0	37.769.300	0	126.243.836	0	0	0	0	126.243.836	100	1.003.261.300	100	28.83	BAGIAN ORGANISAS								
			Proses dan Sistem Administrasi Pemerintahan (Saluran Proses - Non Kumulatif Meningkat)	100	124.923.511.728	100	10.839.437.063	100	21.754.383.123	71.15	9.048.108.878	73.13	11.158.813.640	0	0	0	73.13	11.158.813.640	100	70.248.739.753	100	38.23	BAGIAN REPERBUKSI DAN KEMERDEKAAN								
			Proses dan Sistem Administrasi Pemerintahan (Saluran Proses - Non Kumulatif Meningkat)	100	3.304.460.050	100	395.622.796	100	295.843.500	0	54.036.880	0	17.362.380	0	0	0	0	17.362.380	100	837.137.679	100	23.32	BAGIAN ORGANISAS								
			Proses dan Sistem Administrasi Pemerintahan (Saluran Proses - Non Kumulatif Meningkat)	100	80.026.830.300	100	11.125.150.619	100	11.371.993.200	18.80	1.838.829.174	42.56	5.338.129.166	0	0	0	42.56	5.338.129.166	100	27.928.892.489	100	48.32	BAGIAN REPERBUKSI DAN KEMERDEKAAN								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2024 (%)			Unit Kerja Perangkat Jawsab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13	K	Rp	14		K	Rp	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Peringkat Daerah (RPD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Tn Lalu (n-1)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tn berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2024)			Triplet Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renja PD s.d Thn 2024 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				5			6			7			II					III					IV					13=6+12			14=13/5x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		Rp		K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0.00.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Berupa Invenstasi SPO terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Saluran BA)	4	23.992.882.800	0	1	19.971.142.000	0	7.252.150.800	0	8.188.794.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PO s.d Thn 2024 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PO Thn 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PO s.d Thn 2024 (%)			Unit Kerja Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13+6+12	14+13+300%	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																			III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	25	1.350.000.000		0	25	728.614.800	6	217.394.201	12	360.157.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PO) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Ttn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PO Ttn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PO s.d Ttn 2024 (Akhir Ttn Pelaksanaan Renja PO Ttn 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PO s.d Ttn 2024 (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.01.0001		Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	1	800.000.000	0	1	590.780.800	0	1	590.780.800	0	1	590.780.800	0	1	590.780.800	0	1	590.780.800	0	1	590.780.800	0	1	590.780.800	0	1	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	7	500.000.000	0	7	294.000.000	0	7	294.000.000	0	7	294.000.000	0	7	294.000.000	0	7	294.000.000	0	7	294.000.000	0	7	294.000.000	0	7	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003		Fasilitas Pelayanan Otomotif, Darah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	4	1.050.000.000	0	4	882.939.600	0	4	882.939.600	0	4	882.939.600	0	4	882.939.600	0	4	882.939.600	0	4	882.939.600	0	4	882.939.600	0	4	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Berita Acara Berisi Intensi SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	4	26.233.577.218	1	1	18.278.432.100	0	1	18.278.432.100	0	1	18.278.432.100	0	1	18.278.432.100	0	1	18.278.432.100	0	1	18.278.432.100	0	1	18.278.432.100	0	1	100	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.02.0001		Fasilitas Pengelolaan Bina Hutan Sprinkler	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	9	16.329.827.218	0	9	17.082.742.800	1	9	17.082.742.800	1	9	17.082.742.800	1	9	17.082.742.800	1	9	17.082.742.800	1	9	17.082.742.800	1	9	17.082.742.800	1	9	100	BAGIAN KESDA
4.01.02.2.02.0002		Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	40	9.000.000.000	0	40	677.434.000	6	40	677.434.000	6	40	677.434.000	6	40	677.434.000	6	40	677.434.000	6	40	677.434.000	6	40	677.434.000	6	40	100	BAGIAN KESDA
4.01.02.2.02		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	9	703.750.000	0	8	518.251.300	0	8	518.251.300	0	8	518.251.300	0	8	518.251.300	0	8	518.251.300	0	8	518.251.300	0	8	518.251.300	0	8	100	BAGIAN KESDA
4.01.02.2.02		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	4	2.500.000.000	1	1	1.399.722.800	0	1	1.399.722.800	0	1	1.399.722.800	0	1	1.399.722.800	0	1	1.399.722.800	0	1	1.399.722.800	0	1	1.399.722.800	0	1	100	BAGIAN KESDA
4.01.02.2.03.0001		Fasilitas Pelayanan Produk Hutan Darah	Jumlah Produk Hutan Darah yang Disusun (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	451	600.000.000	0	451	499.837.000	154	451	499.837.000	154	451	499.837.000	154	451	499.837.000	154	451	499.837.000	154	451	499.837.000	154	451	499.837.000	154	451	100	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002		Fasilitas Pelayanan Produk Hutan Darah	Jumlah Produk Hutan Darah yang Disusun (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	44	1.000.000.000	0	44	999.999.200	10	44	999.999.200	10	44	999.999.200	10	44	999.999.200	10	44	999.999.200	10	44	999.999.200	10	44	999.999.200	10	44	100	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003		Fasilitas Pelayanan Produk Hutan Darah	Jumlah Produk Hutan Darah yang Disusun (Salah Satu Dokumen - Kumulatif)	206	900.000.000	0	206	299.997.600	154	206	299.997.600	154	206	299.997.600	154	206	299.997.600	154	206	299.997.600	154	206	299.997.600	154	206	299.997.600	154	206	100	BAGIAN HUKUM

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon diantaranya:

- a. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.
- b. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon periode jangka menengah Renstra Tahun 2019-2024 dapat diketahui capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Hasil Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tahun 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan		Cakupan angka melek Al-Qur'an	Orang/ Lem	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
					309	-	-	-	-	-	309	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
					5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
					390	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat akibat terjadinya resiko sosial		Cakupan angka tempat ibadah yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan menerima hibah dan bantuan sosial arana prasarana keagamaan	Laporan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
					1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Konsistensi Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah dikelola denga tertib dan transparan	Dok	430	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
					417	-	-	-	-	-	417	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya penanganan sengketa/perkara/permasalahan hukum dan penerapan nilai-nilai HAM		Jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah difasilitasi menjadi produk hukum daerah	Perda/ Perkada	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
					8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Tahun 2019																					
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/keurahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme		Cakupan angka kemampuan aparatur desa/keurahan dalam mengelola keuangan desa/keurahan	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka penyelesaian tapal batas wilayah administrasi	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Jumlah peliputan, penyajian data dan informasi kegiatan pemerintahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan	Liputan	350	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya pelayanan data/informasi kehuasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatkan kemampuan/kapasitas akses internet dan jaringan komunikasi/informasi	Paket	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka pemberitaan daerah pada media massa yang adil dan seimbang	Kali	47	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM	UMKM	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya kemampuan dan daya saing koperasi dan UMKM		Jumlah kajian bidang perekonomian dan usaha perdagangan	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka inflasi	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Jumlah Kajian dan Kebijakan di bidang perusahaan daerah	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya keserasian dan kesetaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perekonomian sektor BUMD		Cakupan angka pemanfaatan dana CSR BPR	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan pendapatan BUMD	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Jumlah kajian bidang pembangunan	Buku	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Jumlah pekerjaan yang dilelangkan	SKPD	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
9	Meningkatnya pengelolaan data/informasi pembangunan		Cakupan pengendalian lalu lintas angkutan	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Tahun 2019																					
10	Meningkatnya perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam		Jumlah kajian bidang LH dan Sumber Daya Alam	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Orang/ M2	350	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
11	Meningkatnya efesiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		Jumlah kajian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Dok	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah penerapan SOP, IKM, SP dan SPM persatuan objek pelayanan pada SKPD	OPD	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
13	Meningkatnya sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja		Jumlah minat baca aparatur	Buku	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka kedisiplinan aparatur	Kali	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
14	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah		Jumlah dokumen perencanaan skpd	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Cakupan angka penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah	Laporan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
15	Meningkatnya kemampuan pengelolaan asset daerah		Cakupan asset tanah Pemda yang memiliki dokumen sertifikasi	Kasus	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Jumlah penyampaian laporan atas pengelolaan asset dan barang daerah	Dok	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
16	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kapasitas sumber daya aparatur		Adanya ketersediaan administrasi perkantoran sarana dan prasarana serta perjalanan dinas luar daerah	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan		Jumlah pelaksanaan rapat kerja muspida dan pejabat pemda	%	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Rens tra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tahun 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Meningkatnya perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam		Jumlah kajian bidang LH dan Sumber Daya Alam Cakupan angka rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Dok Orang/ M2	1 350	- -	- -	- -	- -	- -	1 350	- -	- -	- -	- -	- -	100 100	- -	- -	- -	- -	- -
11	Meningkatnya efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		Jumlah kajian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Dok	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah penerapan SOP, IKM, SP dan SPM persatuan objek pelayanan pada SKPD	OPD	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
13	Meningkatnya sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja		Jumlah minat baca aparatur Cakupan angka kedisiplinan aparatur	Buku Kali	65 5	- -	- -	- -	- -	- -	65 5	- -	- -	- -	- -	- -	100 100	- -	- -	- -	- -	- -
14	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah		Jumlah dokumen perencanaan skpd Cakupan angka penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah	Dok Laporan	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	100 100	- -	- -	- -	- -	- -
15	Meningkatnya kemampuan pengelolaan asset daerah		Cakupan asset tanah Pemda yang memiliki dokumen sertifikasi Jumlah penyampaian laporan atas pengelolaan asset dan barang daerah	Kastus Dok	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 1	- -	- -	- -	- -	100 100	- -	- -	- -	- -	- -
16	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kapasitas sumber daya aparatur		Adanya ketersediaan administrasi perkantoran sarana dan prasarana perkantoran serta perjalanan dinas luar daerah	%	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya pelayanan kedinmasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan		Jumlah pelaksanaan rapat kerja muspida dan pejabat pemda	%	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Target NSPK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021
1	Tahun 2020 s.d. 2024	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya koordinasi bidang Pendidikan		Prosentase tingkat ketercapaian target RLS	persen	-	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	100	-	-
			Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian Target RLS	persen	-	-	80	82	84	86	-	-	80	82	84	-	-	100	100
			Prosentase ketercapaian angka harapan hidup	persen	-	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	100	-	-
2	Meningkatnya koordinasi bidang kesehatan		Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Ketercapaian AHH	persen	-	-	80	82	84	86	-	-	80	82	84	-	-	100	100
			Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat	persen	-	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	100	-	-
3	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi		Prosentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	persen	-	-	80	83	86	89	-	-	80	83	86	-	-	100	100
			Prosentase peningkatan koordinasi dalam menurunkan angka fraksi antar dan internal umat beragama	persen	-	95	95	96	97	98	-	95	95	96	97	-	100	100	100
5	Meningkatnya koordinasi penurunan pekat		Prosentase penurunan penyakit masyarakat	persen	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-	-
			Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Penyakit Masyarakat	persen	-	-	81	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	100	100
6	Meningkatnya implementasi jumlah kebijakan pemerintah daerah		Prosentase jumlah perda dan perkara yang diimplementasikan	persen	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100	-	-
			Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang dievaluasi	persen	-	-	62	65	68	70	-	-	62	65	68	-	-	100	100
7	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah		Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	laporan	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100
8	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan daerah		Indeks kepuasan masyarakat	poim	-	3,26	3,30	3,35	3,40	3,50	-	3,26	3,30	3,35	3,40	-	100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah adanya rencana perubahan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya perombakan struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun Sumber Daya Manusia. Namun begitu, kegiatan perencanaan pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tetap diupayakan seoptimal mungkin.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat dipetakan kerangka permasalahan Sekretariat Daerah seperti terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah	Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya penguatan akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya sistem pelaporan kinerja
		Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya fungsi koordinasi
		Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum optimalnya evaluasi program pembangunan
		Belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Belum optimalnya pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa
		Belum optimalnya penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum	Belum optimalnya pengetahuan tentang produk hukum daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kerjasama daerah
		Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perangkat daerah
		Belum optimalnya evaluasi produk hukum daerah	Belum optimalnya evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan
		Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah	Belum optimalnya perampingan kelembagaan dengan peningkatan fungsi perangkat daerah
		Belum optimalnya ketatalaksanaan perangkat daerah	Belum optimalnya pengukuran tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah
		Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Belum optimalnya informasi dan data program bantuan yang dapat diampu oleh masyarakat

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketatalaksanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
10. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;

11. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
12. Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
13. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dan rancangan RKPD perubahan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2024. Tetapi masih dimungkinkan ada pergeseran anggaran antar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang terlampir:

Tabel 2.5
Review Terhadap RKPD dan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024

BAGIAN UMUM

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 BA			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 BA	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	138.370.000,00	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	138.370.000,00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000,00	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA	
3	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Setda	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7 Paket	902.162.200,00	3	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Setda	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	786.535.000,00
4	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Setda	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	71.898.200,00	4	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Setda	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	68.244.200,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Setda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	60.000.000,00	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Setda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	831.494.700,00	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	831.494.700,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	449.881.700,00	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	449.881.700,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64 Paket	811.201.300,00	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64 Paket	811.201.300,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	270 Paket	1.317.364.400,00	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	270 Paket	1.317.364.400,00
10	Penyediaan Barang Cetakam dan Penggandaan	Setda	Jumlah Paket Barang Cetakam dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	1.126.001.200,00	10	Penyediaan Barang Cetakam dan Penggandaan	Setda	Jumlah Paket Barang Cetakam dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	1.126.001.200,00
11	Penyediaan Bahan/Material	Setda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	65 Paket	928.340.600,00	11	Penyediaan Bahan/Material	Setda	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	65 Paket	928.340.600,00
12	Facilitas Kunjungan Tamu	Setda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	270 Laporan	2.021.745.000,00	12	Facilitas Kunjungan Tamu	Setda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	270 Laporan	2.703.725.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.449.312.000,00	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.435.188.400,00
14	Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD	33 Dokumen	119.850.200,00	14	Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arap Dinamis pada SKPD	33 Dokumen	119.850.200,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	19.308.724.000,00		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	19.308.724.000,00
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	609.000.000,00		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	609.000.000,00

BAGIAN UMUM

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Capaian Target		Pagu Indikatif (Rp)	
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Pengadaan Mebel	Setda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Pengadaan Mebel	Setda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	157.114.000,00
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	144.848.000,00
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	972.444.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	
20	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	18	Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	4000 Laporan	667.073.800,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.006.089.600,00
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	248.691.000,00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.240.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	602.347.000,00
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	25 Unit	828.614.800,00
26	Pemeliharaan Mebel	Setda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24	Pemeliharaan Mebel	Setda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	350 Unit	92.000.000,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	312.580.000,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.399.622.500,00
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2.443.571.220,00
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.409.927.300,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 BA	
31	Penyediaan Pakaim Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Jumlah Paket Pakaim Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	29	Penyediaan Pakaim Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Jumlah Paket Pakaim Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	309.288.750,00
								JUMLAH	45.227.971.870,00
								JUMLAH	45.628.132.670,00

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Hasil Analisis Kebutuhan (Usulan Perubahan)				Rancangan RKPD Perubahan							
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Informatif	100 Prosen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Informatif	100 Prosen		
	Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setda	8 Dokumen	99.999.900,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	99.999.800,00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda	4 Laporan	99.999.800,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39.999.800,00	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	1 Laporan	39.999.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Pegawai	19.750.655.000,00	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setda	133 Pegawai	19.750.655.000,00	
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	176.599.900,00	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Setda	1 Dokumen	176.599.900,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.199.800,00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setda	1 Laporan	97.199.800,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	242.000.000,00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		6 Laporan	242.000.000,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 BA		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Berita Acara Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 BA		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.110.588.823,00	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	2 Orang/Bulan	1.110.588.823,00	
9	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	841.000.000,00	9	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	2 Orang/Bulan	841.000.000,00	
				JUMLAH	22.458.043.123,00					JUMLAH	22.458.043.023,00

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Pelayanan Kedisnasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 Prosen			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Pelayanan Kedisnasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 BA					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1	Facilitasi Keprotokolan	Serd	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	731 Laporan	3.450.054.100,00	1	Facilitasi Keprotokolan	Serd	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan
2	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Serd	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	153 Laporan	6.799.999.950,00	2	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Serd	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Serd	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	350 Laporan	2.199.745.600,00	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Serd	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
				JUMLAH	12.449.799.650,00			JUMLAH	12.449.799.650,00

BAGIAN ORGANISASI

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata laksana	100 Prosen			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata laksana
			Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	75 Prosen					Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
			Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah	100 Prosen					Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah
	Penataan Organisasi		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi	1 BA			Penataan Organisasi		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Serd	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	443.153.200,00	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Serd	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Serd	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	130.827.100,00	2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Serd	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Serd	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	259.677.300,00	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Serd	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Serd	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	164.816.400,00	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Serd	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Serd	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	194.148.000,00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Serd	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				JUMLAH	1.192.627.000,00			JUMLAH	1.155.375.300,00

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Rancangan Awal RKPD					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
			Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian	100 Prosen	
	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1 BA	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21 Dokumen	505.925.600,00
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	91 Laporan	387.249.000,00
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	7 Dokumen	135.989.700,00
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	0 Dokumen	-
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen	-
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam					
			Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1 BA	
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	9 Dokumen	408.307.100,00
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	194.999.700,00
				JUMLAH	1.632.471.100,00

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rancangan Awal RKPD					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Administrasi Pembangunan					
			Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	80 Prosen	
	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pembangunan			1 BA	
1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	138.500.000,00
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	104.999.900,00
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	312.677.000,00
				JUMLAH	556.176.900,00

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas	100 Prosen			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Pengadaan Barang dan Jasa		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	1 BA			Pengadaan Barang dan Jasa	
1	Pengelolaan Pengakuan Barang dan Jasa	Serd	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengakuan Barang dan Jasa	1 Dokumen	622.219.200,00	1	Pengelolaan Pengakuan Barang dan Jasa	Serd
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Serd	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	538.447.000,00	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Serd
3	Pembinaan dan Advokasi Pengaduan Barang dan Jasa	Serd	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengaduan Barang dan Jasa	1.050 Orang	711.222.600,00	3	Pembinaan dan Advokasi Pengaduan Barang dan Jasa	Serd
JUMLAH					1.871.888.800,00	JUMLAH		
						1.871.888.800,00		

BAGIAN PEMERINTAHAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESIAHTEBAHAN RAKYAT		Prosentase Pemenuhan Administrasi Tata Pemerintahan	100 Prosen			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESIAHTEBAHAN RAKYAT	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1 BA			Administrasi Tata Pemerintahan	
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Serd	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	590.780.800,00	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Serd
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Serd	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	294.002.000,00	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Serd
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Serd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	1.083.171.600,00	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Serd
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 BA			Fasilitasi Kerjasama Daerah	
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Serd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	215.799.900,00	4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Serd
5	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Serd	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	33.758.100,00	5	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Serd
JUMLAH					2.217.512.400,00	JUMLAH		
						2.057.512.400,00		

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					(1)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Prosen					Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Prosen	
			Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	90 Prosen					Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Prosen	
			Prosentase Kualitas Kehidupan Kemaanuaan Yang Ditingkatkan	99 Prosen					Prosentase Kualitas Kehidupan Kemaanuaan Yang Ditingkatkan	100 Prosen	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 BA			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 BA	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	17.152.745.800,00	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	17.167.745.800,00
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja T erkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pendakkk dan KB	45 Dokumen	677.434.000,00	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja T erkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pendakkk dan KB	45 Dokumen	677.434.000,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja T erkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perputakaan, Kearsipan, T rantibaa Linmas	8 Dokumen	658.252.300,00	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setda	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja T erkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perputakaan, Kearsipan, T rantibaa Linmas	8 Dokumen	658.252.300,00
JUMLAH					18.488.432.100,00					JUMLAH	18.503.432.100,00

BAGIAN HUKUM

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					(1)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan	90 Prosen					Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan	90 Prosen	
			Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 BA					Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 BA	
1	Fasilitasi Penyusunan Prodek Hukum Daerah	Setda	Jumlah Prodek Hukum Daerah yang Dasaan	455 Dokumen	499.857.000,00	1	Fasilitasi Penyusunan Prodek Hukum Daerah	Setda	Jumlah Prodek Hukum Daerah yang Dasaan	455 Dokumen	499.857.000,00
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	599.898.200,00	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	599.898.200,00
3	Pendokumentasian Prodek Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda	Jumlah Prodek Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diddokumentasi	206 Dokumen	299.967.600,00	3	Pendokumentasian Prodek Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Setda	Jumlah Prodek Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diddokumentasi	206 Dokumen	299.967.600,00
JUMLAH					1.399.722.800,00					JUMLAH	1.399.722.800,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: *“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi: 1. Industri 2. Pariwisata 3. Ketahanan Pangan 4. UMKM 5. Infrastruktur 6. Transformasi Digital 7. Pembangunan Rendah Karbon 8. Reformasi Perlindungan Sosial 9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan 10. Reformasi Kesehatan.

Adapun 7 prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun tema pembangunan Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon adalah *“Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditi Unggul Yang Didukung Oleh Pembangunan Sumber Daya Alam Unggul Serta Layanan Dan Kebijakan Publik Yang*

Berorientasi Kepada Masyarakat” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar;
2. Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat;
3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi;
5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial;
6. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan;
8. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima; dan
9. Peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan antar dan inter umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Akhir Renstra
		Semula	Menjadi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Peran dan Fungsi Koordinasi Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat		Presentase ketercapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Presentase ketercapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	98%	98%	99%	99%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pendidikan	Presentase Tingkat Ketercapaian Target RLS	Presentase Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian Target RLS	-	98%	80%	82%	84%	86%
	Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesehatan	Presentase Ketercapaian Angka Harapan Hidup	Presentase Evahuasi Kebijakan dalam Ketercapaian AHH	-	98%	80%	82%	84%	86%
	Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	Presentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Presentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	-	98%	80%	83%	86%	89%
Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Antar dan Internal umat beragama		Presentase ketercapaian Indeks Kerukunan Umat beragama (KUB)	Presentase ketercapaian Indeks Kerukunan Umat beragama (KUB)	-	98%	98%	99%	99%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Keagamaan	Presentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Frksi Antar dan Internal Umat Beragama	Presentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Frksi Antar dan Internal Umat Beragama	-	95%	95%	96%	97%	98%
	Meningkatnya Koordinasi Penurunan Pekat	Presentase Penurunan Penyakit Masyarakat	Presentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Penyakit Masyarakat	-	80%	81%	-	-	-
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	65 poin	68 poin	70 poin	73 poin	79 poin	80 poin
	Meningkatnya Implementasi Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah Perda dan Perkada yang Diimplementasikan	Presentase Jumlah Perda dan Perkada yang dievaluasi	-	60%	62%	65%	68%	70%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3.26 poin	3.30 poin	3.35 poin	3.40 poin	3.50 poin

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja dan Pendanaan
Sekretariat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah:

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Cirebon terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon yaitu pada:

- Misi ke-2 : “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.”
- Misi ke-3 : “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.”
- Misi ke-4 : “Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.”

2) Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu

keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan oleh Sekretariat Daerah. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Sekretariat Daerah Tahun 2024.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Sekretariat Daerah sifat penyebarannya di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan
Kebutuhan dana/pagu indikatif hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

3.3.3 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan. Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima” sebagaimana tertuang pada RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon disusun sejalan dengan tema RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yaitu *“Penguatan Pemulihan Ekonomi secara Inklusif didukung Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Peningkatan Daya Saing, Investasi dan Lapangan Kerja”*, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan antar dan internal umat beragama
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

Hasil evaluasi atas Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program / kegiatan / sub kegiatan adalah 100% atau dikategorikan sangat baik.

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Perubahan tersebut dengan sebaik-baiknya;
- b. Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon haruslah berpedoman kepada RKPD Perubahan dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
- c. Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
- d. Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tanggal : 25 Juli 2024
Nomor : 000.7.6.1/13/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

23/24
8

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024. sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



DEWI ROSMALA, SE., M.Si.

Pembina

NIP. 19780104 200604 2 020

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.